

PENGARUH ALOKASI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA NEGARA-NEGARA ASIAN EMERGING ECONOMIES

THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING ALLOCATION ON ECONOMIC GROWTH OF ASIAN EMERGING ECONOMIES COUNTRIES

Risky Dwi Afriadi¹, Yudi Sutrasna², Thomas Gabriel Josstenz³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(riskyd.afriadio1102012@gmail.com)

Abstrak - Pemerintah dihadapkan pada dilema dalam pengalokasian anggaran belanja antara sektor pertahanan dan non-pertahanan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh belanja pemerintah fungsi pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara *Asian Emerging Economies* periode 2001-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data panel. Model ekonometrika yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2001 sampai dengan 2017, terdapat hubungan yang signifikan antara belanja pemerintah pada negara-negara *Asian Emerging Economies* pada sektor pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi alokasi belanja pemerintah pada sektor pertahanan dan kesehatan yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Sementara itu kenaikan alokasi belanja pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : *Asian Emerging Economies*, belanja pemerintah, data panel, *Fixed Effect Model*, dan pertumbuhan ekonomi.

Abstract - The government is faced with a dilemma in allocating budgets between the defense and non-defense sectors to accelerate economic growth. There will be a trade-off between the defense budget allocation and the public welfare budget given the budget constraints. The purpose of this study is to analyze the effect of government spending on defense, education and health functions on economic growth in *Asian Emerging Economies* in the 2001-2017 period. This research uses quantitative research methods with panel data. The econometric model used in this study is the Fixed Effect Model. The results showed during the period 2001 to 2017, there was a significant relationship between the government spending of *Asian Emerging Countries* countries in the defense, education and health sectors on economic growth. This is evident from the statistical probability less than alpha 5 percent. The realization of the increased allocation of government spending on the defense and health sectors will cause economic growth to increase. Meanwhile, an increase in the allocation of education spending will reduce economic growth.

Keywords : *Asian Emerging Countries*, economic growth, *Fixed Effect Model*, government spending, and panel data.

¹ Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

Pendahuluan

Pengeluaran di sektor pertahanan dan non-pertahanan seringkali menjadi dilema dalam alokasi pengeluaran di beberapa negara. Pada negara-negara berkembang, baik konflik yang terjadi di dalam negara tersebut maupun konflik dengan negara lainnya, pengeluaran untuk sektor pertahanan mungkin saja menjadi komponen utama pengeluaran di negara-negara tersebut. Sebaliknya di negara-negara yang tidak mengalami konflik, alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan mungkin akan menjadi komponen utama pengeluarannya⁴.

Teori ekonomi publik menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan barang publik, yaitu barang berwujud dan tidak berwujud yang berhak dinikmati oleh masyarakat, termasuk rasa aman dalam berkehidupan⁵. Selain kondisi sosial politik dan iklim investasi, faktor keamanan juga berperan penting dalam menunjang kondisi perekonomian, yang tentunya akan memberikan

pengaruh secara positif. Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional mengejawantahkan keamanan nasional sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Keamanan nasional harus disediakan oleh pemerintah, salah satunya melalui sistem pertahanan negara. Artinya, negara harus menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat.

Sistem pertahanan yang kuat memerlukan sarana dan prasarana seperti alutsista dan personil memadai. Urusan pertahanan mutlak membutuhkan dukungan anggaran yang besarnya ditentukan oleh pemerintah⁶. Di Indonesia, setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998, pemerintah menyadari bahwa kemajuan ekonomi harus pula didukung dengan peningkatan sektor pertahanan, hal ini didasari karena semakin banyak dan semakin kompleksnya ancaman yang harus dihadapi oleh setiap negara⁷. Pada

⁴ Nur Muhammad Herwansyah, "Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015", Tesis Magister Universitas Pertahanan, 2017.

⁵ Joseph E. Stiglitz, *Economic of The Public Sector Third Edition*, (New York: W.W. Norton and Company Ltd, 2000), hlm. 77.

⁶ Purnomo Yusgiantoro, *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 66.

⁷ Nur Muhammad Herwansyah, "Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015", Tesis Magister Universitas Pertahanan, 2017.

masa ini, ancaman yang harus dihadapi bukan lagi sebatas pada ancaman militer tetapi juga sudah bersifat non-militer seperti *cyber crime*, narkoba, *illegal fishing*, dan perang asimetris.

Pertahanan yang kuat sangat dibutuhkan mengingat ancaman militer dan non-militer yang dihadapi semakin beragam dan kompleks, dalam bentuk pertahanan militer dan nir-militer. Penguatan sektor pertahanan tentu saja membutuhkan peningkatan alokasi pengeluaran di sektor tersebut⁸. Ketika pemerintah menganggarkan pengeluarannya untuk sektor pertahanan, maka akan timbul *opportunity cost* terhadap alokasi pengeluaran pada sektor lainnya seperti pada sektor kesejahteraan masyarakat.

Konsep keamanan mengalami pergeseran isu-isu keamanan tradisional menuju pada isu keamanan non-tradisional terutama pada *people oriented* yang berkembang menjadi multidimensional seperti ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lain⁹. Negara-negara pada benua Asia yang termasuk

emerging economies mengalami ancaman dan potensi konflik yang hampir sama seperti konflik Laut Cina Selatan, terorisme, dan pemberontakan dari warga negara sendiri. Sehingga menarik untuk diamati perkembangan alokasi belanja pertahanan dari negara-negara tersebut. Istilah *emerging economies* merupakan istilah bagi negara yang mengalami percepatan pertumbuhan karena menjadi alternatif tujuan investasi selain negara maju. *Emerging economies* menerima aliran dana asing yang deras dan membuat mereka mengalami pertumbuhan pesat¹⁰. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut juga menyimpan efek kejut yang dalam. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh arus modal asing yang suatu saat bisa ditarik. Apalagi jika investasi tersebut tidak berupa *foreign direct investment* (penanaman modal langsung/ke sektor riil) dan hanya berkulat di *portofolio investment* (penanaman modal di surat-surat berharga/ke sektor keuangan) saja. Hal ini merupakan fenomena *hot money* yang sangat meresahkan para ekonom dikarenakan potensi penarikan modal

⁸ Teodora Fuior, *Defence Budget Analysis*, (Bratislava: DCAF, 2008), hlm.153.

⁹ Barry Buzan, *People, State, and Fear; A Agenda For Internasional Security Studies in the Post Cold Era 2nd edition*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm. 776.

¹⁰ Jim O'Neill, "Investors Can't Afford To Treat All Emerging Markets The Same", dalam <https://www.businessinsider.com/jim-oneill-investing-emerging-markets-2013-6?IR=T>, 22 Mei 2015, diakses pada 25 Desember 2019.

asing kapan saja bisa terjadi. *Emerging economies* akan selalu harus mengantisipasi segala potensi *shock* (resesi) yang bisa datang kapan saja¹¹.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia global saat ini memiliki keinginan bersama untuk mengurangi konflik dan mewujudkan dunia yang lebih damai. Hal ini ditandai dengan beberapa negara mulai mengurangi alokasi pengeluaran pertahanannya untuk kemudian lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang lebih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan¹². Kesejahteraan masyarakat sangat penting karena merupakan kunci dalam pembangunan negara. Kesejahteraan masyarakat memerlukan dukungan pendidikan dan kesehatan yang memadai agar dapat tercapai optimal bagi masyarakat.

Sektor pendidikan merupakan faktor penting dalam rangka untuk

¹¹ Prasetyantoko, "Pengamat Ingatkan Pemerintah untuk Waspada Slowbalisation", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190924/9/1151690/pengamat-ingatkan-pemerintah-untuk-waspada-slowbalisation>, 11 Juni 2013, diakses pada 25 Desember 2019.

¹² Nur Muhammad Herwansyah, "Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015", Tesis Magister Universitas Pertahanan, 2017.

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai suatu bentuk investasi bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa mendatang. Pemerintah memiliki peranan penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan. Pemerintah harus berusaha menjadikan pendidikan lebih bersifat *public goods* dibandingkan *private goods*. Apabila pendidikan lebih bersifat *public goods* maka pengeluaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan akan lebih kecil dibandingkan apabila pendidikan tersebut lebih bersifat *private goods*. Namun demikian, terdapat konsekuensi logis yang harus dihadapi pemerintah, yaitu alokasi pengeluaran untuk sektor ini akan menjadi lebih besar.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, besarnya alokasi pengeluaran yang disediakan akan sangat tergantung kepada seberapa pentingnya bidang ini menjadi fokus perhatian di suatu negara. Apabila suatu negara merasakan bahwa pelayanan kesehatan harus lebih banyak yang bersifat *public goods* yang harus disediakan oleh negara, maka alokasi pengeluaran untuk sektor ini akan

memiliki alokasi yang besar. Pelayanan kesehatan sendiri merupakan suatu produk yang bersifat heterogen karena memiliki jenis pelayanan yang sangat banyak. Pelayanan kesehatan dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, maupun rehabilitatif. World Health Organization (WHO), dalam Sidang Dewan Eksekutif pada tahun 1981, merekomendasikan setiap negara setidaknya mengalokasikan minimal lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk dianggarkan pada sektor kesehatan¹³. Belanja pemerintah dalam bidang pertahanan, pendidikan, dan kesehatan akan menyebabkan peningkatan keamanan negara dan kualitas modal manusia. Selanjutnya hal tersebut akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan¹⁴. Belanja pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah

untuk mensejahterakan masyarakatnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah pada bidang pertahanan, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi¹⁵.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, pemerintah dihadapkan pada dilema dalam pengalokasian anggaran belanja antara sektor pertahanan dan non-pertahanan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh masalah pertahanan yang tidak selalu berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Akan terjadi *trade-off* antara alokasi anggaran pertahanan dan anggaran kesejahteraan masyarakat mengingat keterbatasan anggaran. Prioritas anggaran ini bergantung pada kebijakan presiden yang dijalankan oleh pemerintah atau kementerian terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pertahanan, pendidikan dan kesehatan terhadap

¹³ Nur Muhammad Herwansyah, "Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015", Tesis Magister Universitas Pertahanan, 2017.

¹⁴ M.P. Todaro dan S.C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Penerjemah: Haris Munandar), (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 78.

¹⁵ Richard A. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practise*, (New York: Mc Graw Hill Book Company, 2006), hlm. 432.

pertumbuhan ekonomi di *Asian Emerging Economies*.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda atas hubungan belanja pemerintah dalam bidang pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif atau negatif. Hasilnya bisa berbeda pada negara maupun daerah. Sifat dari dampak pengeluaran pemerintah akan tergantung dengan kondisi negara. Kondisi negara-negara *emerging economies* di Asia yang mayoritas sebagai negara sedang berkembang tentunya akan berbeda dengan negara maju. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya akan diuraikan di bawah ini.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan Donald N dan Shuanglin (1993) yang membahas pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan di berbagai negara maju dan negara sedang berkembang. Hasil yang didapat adalah sektor pendidikan dan keamanan berpengaruh positif dan sektor kesejahteraan berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi¹⁶. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jülide Yildirim dan Selami Sezgin (2002). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat *trade-off* antara pengeluaran sektor pertahanan dan sektor kesejahteraan di negara Turki. Pengeluaran sektor kesejahteraan di dalam penelitian ini direpresentasikan sebagai pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan data tahunan pada tahun 1924 sampai 1996. Model yang digunakan adalah *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat *negative trade off* antara pengeluaran sektor pertahanan dengan kesehatan dan terdapat *positive trade off* antara pengeluaran sektor pertahanan dengan pendidikan. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran sektor pendidikan adalah signifikan dan negatif sedangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran sektor pertahanan dan kesehatan adalah signifikan dan positif. Sementara itu hubungan antara

¹⁶ Donald N. Baum & Shuanglin Lin, "The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defense", *Journal of Economic Development*, Vol. 18, No.1, 1993, hlm. 175-185.

penerimaan pajak dengan pengeluaran sektor pendidikan adalah signifikan dan negatif sedangkan hubungan antara penerimaan pajak dengan pengeluaran sektor pertahanan dan kesehatan adalah signifikan dan positif¹⁷.

Kemudian penelitian Suleiman Abu-Daber & Aamer S (2003) menggunakan model *Standard Granger Causality* dan *Error Correction Model* (ECM) yaitu pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran sipil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir¹⁸. Berikutnya penelitian Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García (2006) yang berjudul *Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries: An Empirical Approach* menemukan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian. Untuk

negara-negara maju seperti di Eropa terdapat hubungan yang positif¹⁹.

Terakhir hasil penelitian Nur Muhammad Herwansyah (2017) yaitu terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara (1) pengeluaran sektor pertahanan dengan pendidikan; (2) pengeluaran sektor pertahanan dengan kesehatan dan (3) belanja sektor pertahanan dengan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan proporsi pengeluaran sektor pertahanan dan pendidikan namun mengurangi proporsi pengeluaran sektor kesehatan²⁰.

Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan kajian terhadap bagaimana hubungan alokasi anggaran pertahanan dan non-pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan

¹⁷ Julide Yildirim & Selami Sezgin, "Defence, Education and Health Expenditures in Turkey 1924-96", *Journal of Peace Research*, Vol. 39, No. 5, 2002, hlm. 569-580.

¹⁸ Suleiman Abu Bader & Aamer S., "Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria", dalam <http://ssrn.org/-163>, diakses pada 5 Januari 2020.

¹⁹ Saez Marta Pascual and Santiago Álvarez-García, "Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries: An empirical Approach", dalam <http://ssrn.org/-id14104>, 2006, diakses pada 5 Januari 2020.

²⁰ Nur Muhammad Herwansyah, "Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015", Tesis Magister Universitas Pertahanan, 2017.

manajerial dan ekonomi yang berangkat dari data²¹.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series secara tahunan. Sumber data berasal dari website World Bank (www.worldbank.com). Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara Asia dengan sampel berupa negara-negara Asia yang termasuk dalam kategori *emerging economies*. Penentuan negara-negara yang berkategori *emerging economies* di Asia berdasarkan kategori *emerging economies* yang digunakan oleh IMF dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook* tahun 2012. Kategori *emerging economies* tersebut masih digunakan oleh International Monetary Fund (IMF) hingga kini²². Negara-negara yang termasuk dalam objek penelitian ini adalah Indonesia (IDN), Malaysia (MYS), Filipina (PHL), Thailand (THA), Pakistan (PAK), India (IND), dan Cina (CHN).

Penelitian ini menggunakan data panel 17 tahun dan 7 negara. Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Analisis regresi merupakan suatu metode statistik yang berguna untuk membangun suatu persamaan atau

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Meode Kuantitatif*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 44.

²² International Monetary Fund, *Laporan Stabilitas Keuangan Global*, Jakarta, 2018.

memodelkan fungsi hubungan antara variabel tidak bebas/dependen (Y) dengan variabel bebas/independen (X). Variabel independen dalam persamaan regresi adalah variabel bebas yang berfungsi sebagai variabel penjelas, variabel yang memengaruhi, atau variabel yang memprediksi variabel dependen²³. Persamaan regresi dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai Y sebenarnya (aktual) dengan nilai dugaan yang minimal²⁴. Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y)_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(X_1)_{it} + \beta_2 \text{Log}(X_2)_{it} + \beta_3 \text{Log}(X_3)_{it} + e \dots (1)$$

Keterangan:

- X₁ : Proporsi Belanja Sektor Pertahanan (%)
- X₂ : Proporsi Belanja Sektor Pendidikan (%)
- X₃ : Proporsi Belanja Sektor Kesehatan (%)
- Y : Pertumbuhan Ekonomi (%)
- β₀ : Konstanta
- β₁ : Parameter Belanja Pertahanan
- β₂ : Parameter Belanja Pendidikan
- β₃ : Parameter Belanja Kesehatan
- t : Waktu (tahun)

²³ Damodar N. Gujarati, *Basic Econometric Fourth Edition*, (New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2003), hlm. 561.

²⁴ Rachbini, Widiarto, Agus Herta Sumarto, dan Didik J.R., *Statistika Terapan Cara Mudah dan Cepat Menganalisis Data*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 56.

i : Negara-negara yang diobservasi
(Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina,
Pakistan, India, dan Cina)
e : error term

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Terdapat pengaruh positif antara belanja pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Terdapat pengaruh positif antara belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Terdapat pengaruh positif antara belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Hasil regresi dapat ditulis ke dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{Log}(\text{Growth})_{it} = 1,444288 + 0,294864\text{Log}(\text{Def})_{it} - 0,415284\text{Log}(\text{Edu})_{it} + 0,387599\text{Log}(\text{Health})_{it}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai probabilitas statistik pada konstanta atau β_0 adalah sebesar 0.0024. Nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan alpha 5% sehingga variabel konstanta pada persamaan di atas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. Nilai konstanta sebesar 1,44 mencerminkan

bahwa tanpa adanya perubahan pada variabel-variabel dependen, maka pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 1,44% pada negara-negara *Asian Emerging Economies*.

Selanjutnya, variabel belanja pemerintah fungsi pertahanan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai probabilitas t statistik 0,0155 yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah atas pada bidang pertahanan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan teori dimana belanja pemerintah atas pertahanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien β_1 sebesar 0,294864 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan alokasi belanja pada sektor pertahanan sebesar 1% maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,29%.

Peningkatan alokasi belanja pertahanan bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara yang berikutnya akan berimbas pada kondisi perekonomian. Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investasi di berbagai bidang seperti infrastruktur, pariwisata, penanaman modal asing, dan

sebagainya. Negara-negara *emerging economies* dalam penelitian ini merupakan negara-negara tujuan investasi baru karena pertumbuhan ekonominya yang cukup cepat sehingga penting untuk mengalokasikan belanja pertahanan untuk menjaga keamanan. Hal ini sejalan dengan teori perumbuhan ekonomi Keynes yang menyatakan bahwa investasi dan belanja pemerintah merupakan komponen penyusun PDB yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi²⁵.

Negara-negara *Asia Emerging Economies* menetapkan rasio minimal anggaran pendidikan terhadap total belanja pemerintah yang jumlahnya berbeda-beda. Pada data penelitian ini, masing-masing negara mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 10% dari total belanjanya. Berdasarkan hasil penelitian, variabel belanja pemerintah atas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai probabilitas *t* statistik 0,0061 yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hal tersebut sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis dimana belanja pemerintah atas pendidikan seharusnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien β_2 sebesar -0,415284 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan alokasi belanja pada sektor pendidikan sebesar 1% maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 0,41%.

Struktur belanja dalam sektor pendidikan adalah faktor utama yang menjelaskan pengaruh negatif alokasi belanja pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dibandingkan dengan hambatan pendanaan. Pola ini diteliti di Indonesia oleh World Bank pada tahun 2006, temuannya adalah pada saat belanja daerah dianalisis secara agregat untuk sektor pendidikan, rata-rata 96% belanja rutin kabupaten/kota diperuntukkan bagi gaji atau insentif. Komponen gaji dalam belanja pendidikan menunjukkan jumlah yang signifikan pada daerah yang diteliti, dengan hanya menyisakan bagian kecil bagi pos belanja lainnya.

²⁵ John M. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, (London: Macmillan, 1936), hlm. 229.

Ketiadaan sumber daya bukanlah alasan di balik rendahnya belanja pendidikan non-gaji karena kabupaten dan kota telah menikmati kenaikan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) secara besar-besaran, terutama pada tahun 2006. Kenaikan transfer telah mendorong pendapatan kabupaten/kota secara signifikan, sehingga menaikkan dana walaupun belum berhasil mengatasi masalah struktur belanja²⁶. Walaupun sebagian besar dari anggaran pendidikan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, belanja tersebut sebagian besar merupakan belanja rutin yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Negara-negara tujuan investasi baru Asia dalam penelitian ini menetapkan alokasi anggaran kesehatan terhadap total belanja pemerintah yang jumlahnya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena cakupan anggaran ini berbeda-beda termasuk jaminan kesehatan, subsidi pengobatan untuk masyarakat miskin dan sebagainya. Besaran anggaran kesehatan ini juga ditentukan oleh prioritas dan kemampuan pemerintah

masing-masing negara. Berdasarkan hasil penelitian, variabel belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai probabilitas t statistik 0,0226 yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah atas pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan teori dimana belanja pemerintah atas kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien β_3 sebesar 0,387599 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan alokasi belanja pada sektor kesehatan sebesar 1% maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,39%.

Perkembangan pengeluaran pemerintah atas kesehatan di negara berkembang seperti negara-negara di Asia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian

²⁶ World Bank, "Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, Sebuah Kajian Pengeluaran Publik dan Pengelolaan Keuangan pada Tingkat Daerah", Jakarta, 2008.

rupa oleh pemerintah melalui belanja pemerintah. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, dan peningkatan gizi²⁷.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas modal manusia. Modal manusia merupakan bentuk kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dan menunjukkan kualitas dari individu tersebut. Kualitas sumber daya manusia mampu menjadi nilai jual seseorang di pasar tenaga kerja. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka semakin besar pula permintaan atas tenaga kerja tersebut karena kualitas sumber daya manusia yang baik memiliki produktivitas yang tinggi²⁸.

²⁷ Arum Atmawikarta, *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*, Bappenas, 2009.

²⁸ Agripa Toar Sitepu, "Beban Kerja dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.4, 2013, hlm. 1123-1133.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah selama periode tahun 2001 sampai dengan 2017, terdapat hubungan yang signifikan antara belanja pemerintah negara-negara *Asian Emerging Economies* pada sektor pertahanan, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari probabilitas statistik yang lebih kecil dari alpha 5 persen. Realisasi alokasi belanja pemerintah pada sektor pertahanan dan kesehatan yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi naik. Sementara itu kenaikan alokasi belanja pendidikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu meningkatkan efektivitas pengeluaran atas pendidikan dan kesehatan. Belanja pendidikan dan kesehatan yang cukup besar harus dapat mencapai target-target capaian yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu perlu diperhatikan pula persebaran anggaran agar dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga dapat dinikmati

seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk proporsi belanja pertahanan Indonesia angkanya masih tertinggal secara rata-rata dengan negara lain dalam penelitian ini. Hal ini harus disikapi oleh pemerintah (Kementerian Pertahanan) dengan peningkatan anggaran pertahanan baik secara proporsi maupun nominalnya karena pertahanan yang kuat mutlak membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Pemerintah seharusnya mengetahui kebijakan terbaik mana yang harus dipilih agar kebijakan yang diambil hasilnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan perencanaan yang terukur agar kebijakan anggaran dan belanja dapat mencapai tujuan yang diinginkan karena akan selalu terdapat trade-off dari kebijakan-kebijakan alokasi belanja. Dalam kaitannya dengan belanja pada sektor pertahanan, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah harus mengetahui sektor-sektor mana saja yang harus menjadi prioritas agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Akademisi

Melalui penelitian ini, dapat diketahui pengaruh belanja pemerintah pada berbagai sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah variabel

dalam penelitian ini terbatas yaitu 3 variabel dari 11 fungsi belanja pemerintah sehingga masih terbuka kemungkinan variabel belanja yang lainnya sebagai determinan lain pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini hanya menyertakan data hingga tahun 2017 dikarenakan adanya keterbatasan data yang disajikan oleh World Bank. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyertakan data yang lebih terkini sehingga hasilnya lebih baik dan komprehensif.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmawikarta, Arum. (2009). *Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi*. Bappenas.
- Buzan, Barry. (1991). *People, State, and Fear; An Agenda For Internasional Security Studies in the Post Cold Era 2nd Edition*. London: Harvester Whatsheaf.
- Fuor, Teodora. (2008). *Defence Budget Analysis*. Bratislava: DCAF.
- Gujarati, Damodar N. 2003, *Basic Econometric Fourt Edition*. New York : The McGraw-Hill Compaies Inc.
- International Monetary Fund. (2018). *Laporan Stabilitas Keuangan Global*. Jakarta.
- Keynes, John M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Meode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Musgrave, Richard A. (2006). *Public Finance in Theory and Practise*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Rachbini, Widarto, Agus Herta Sumarto, dan Didik J.R. (2018). *Statistika Terapan Cara Mudah dan Cepat Menganalisis Data*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Stiglitz, Joseph E. (2000). *Economic of The Public Sector, Third Edition*. New York: W.W. Norton and Company Ltd.
- Todaro, M.P. dan S.C. Smith. (2012). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah: Haris Munandar. Jakarta : Erlangga.
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank. (2008). "Investasi dalam Pendidikan pada Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, Sebuah Kajian Pengeluaran Publik dan Pengelolaan Keuangan pada Tingkat Daerah". Jakarta.
- Jurnal**
- Bader, Suleiman Abu and Aamer S. (2003). "Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth : Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria". Retrieved from <http://ssrn.org/-163>, diakses tanggal 5 Januari 2020.
- Baum, Donald N and Shuanglin Lin. (1993). "The Differential Effects on Economic Growth of Government Expenditure on Education, Welfare, and Defense". *Journal of Economic Development*, Vol. 18, No.1, pp.175-185.
- Saez Marta Pascual and Santiago Álvarez-García. (2006). "Government Spending and Economic Growth in the European Union Countries :An empirical Approach". Retrieved from JEL, <http://ssrn.org/-id14104>, diakses tanggal 5 Januari 2020.
- Sitepu, Agripa Toar. (2013). "Beban Kerja dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado", *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4, hh. 1123-1133.
- Yildirim, Julide, dan Selami Sezgin. (2002). "Defence, Education and Health Expenditures in Turkey, 1924-96". *Journal of Peace Research*, Vol. 39, no. 5, 2002, pp. 569-580.
- Tesis**
- Herwansyah, Nur Muhammad. (2017). *Hubungan Antara Pengeluaran Sektor Pertahanan, Pendidikan, dan Kesehatan Pada Realisasi Pengeluaran Pemerintah Pusat Tahun 1999-2015*. (Tesis Magister). Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.
- Website**
- O'Neill Jim. (2013). "Investors Can't Afford To Treat All Emerging Markets The Same". Retrieved from <https://www.businessinsider.com/jim-oneill-investing-emerging-markets-2013-6?IR=T>, diakses pada 25 Desember 2019.
- Prasetyantoko. (2019). "Pengamat Ingatkan Pemerintah untuk Waspadai Slowbalisation". Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190924/9/1151690/pengamat-ingatkan-pemerintah-untuk-waspadai-slowbalisation>, diakses pada 25 Desember 2019.